

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF NATIONAL EDUCATION NUMBER 13 YEAR 2007 CONCERNING COMPETENCY STANDARDS FOR SCHOOL HEADS

Yulia Wiji Astika¹⁾, Fitriyani²⁾, Burhanuddin³⁾

^{1,2,3}Administrasi Negara, STIA Setih Setio

Email : ¹yuliawijastika@gmail.com

ABSTRAK

Standar kompetensi yang dimiliki kepala SMP berbeda-beda sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan kepala SMP dalam tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar kompetensi kepala SMP dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan peraturan ini serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala dinas, pengawas dan kepala SMP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus sekitar 56%. Hambatan yang terjadi dalam implementasi yaitu kurangnya sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP, lambatnya informasi yang disampaikan, minimnya dedikasi dan tingkah oknum yang menghambat jalannya implementasi, dan kurangnya koordinasi antar birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah, menegur dan membina staff agar tepat waktu dalam menyampaikan informasi, memberikan insentif yang lancar kepada birokrasi, dan birokrasi dituntut agar bekerja sesuai SOP yang telah ada pada pekerjaan tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Standar Kompetensi, Kepala Sekolah

ABSTRACT

The competency standards of headmaster in SMP was different so that the lack of understanding and knowledge of headmaster in SMP in their duties and functions based on the national education minister's regulation No. 13/2007 concerning Principal Competency. The aims of study was to determine the implementation of the competency standard of Junior High School headmaster and to find out the obstacles faced by the Department of Education and Culture in implementing this regulation and to find out efforts to overcome these obstacles. This study was qualitative descriptive. The sample in this study was the head of department, supervisor and the head of Junior High School. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the competency standard for Junior High School headmaster in Bungo had general qualification standard 100%,

while for the special qualification standard around 56%. The obstacles that occur in implementation are the lack of socialization regarding the competency standards of Junior High School headmaster, the slowness of the information delivered, the lack of dedication and behavior that hinders the implementation path, and the lack of coordination between bureaucracy. Efforts made in overcoming these obstacles were increasing the socialization of school principals' competency standards, reprimanding and fostering staff to be timely in delivering information, providing smooth incentives to the bureaucracy, and bureaucracy is demanded to work according to existing SOPs on the job.

Keywords: *Implementation, Competency Standards, Principal*

PENDAHULUAN

Ahmad dan Didin (2013) mendefinisikan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu dan juga proses mentransformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi kegenerasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga lainnya. Dalam hal ini pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah sekolah.

Sekolah adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembelajaran kepada peserta didik. Lembaga pendidikan ini menjalankan pembelajaran secara formal. Berbeda halnya dengan keluarga dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan secara informal. Selain itu, sekolah juga merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran strategis terutama dalam mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang akan memegang estafet pemerintahan selanjutnya. Keberadaan sekolah dalam sub sistem kehidupan sosial menempatkan sekolah dalam bagian dari sistem sosial. Sekolah harus peka dan tanggap terhadap tuntutan dari masyarakat sekitar.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentunya tidak akan lepas dari peran kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki wewenang dan diberikan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan sekolah, baik sekolah negeri atau swasta agar sekolah tersebut maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan orang tua

peserta didik, masyarakat maupun pemerintah sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik. (Tabrani: 2013).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah menjelaskan bahwa untuk diangkat menjadi kepala sekolah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Untuk standar kualifikasi meliputi kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah yaitu kualifikasi minimal akademik (S1), pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, dan pangkat serendah-rendahnya III/C atau setara, sedangkan kualifikasi khusus yaitu berstatus guru, bersertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah.

Melayu S.P Hasibuan (2016) menyatakan bahwa kepala sekolah dituntut untuk memiliki kesiapan dalam mengelola sekolah. Kesiapan tersebut berupa kemampuannya dalam membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan menguasai kemampuan tersebut, diharapkan kepala sekolah selaku pemimpin dapat mendorong dan menegakkan kedisiplinan kepada bawahannya agar mereka mampu menunjukkan produktifitasnya dengan baik.

Dari observasi yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah bahwa standar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing kepala Sekolah Menengah Pertama berbeda-beda, sebagian kepala SMP sudah memiliki pengetahuan mengenai standar kompetensi kepala sekolah yang baik dan sebagian kepala SMP belum memilikinya. Kemudian masih minimnya koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dengan kepala SMP serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan kepala SMP dalam tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi kepala sekolah dengan bawahannya dan kurangnya wawasan kepala sekolah dalam membina guru dan staff untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah di kabupaten Bungo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah serta upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Leo (2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dalam peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tugas dan tujuan atau sasaran yang dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Georgi C. Edwards III ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implemator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Sumberdaya terdiri dari berbagai elemen yaitu staff, informasi, dan wewenang. Disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal yang harus dicermati sebagai indikatornya yaitu pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan insentif adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana. Kemudian struktur birokrasi, karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi

atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu menentukan Standar *Operating procedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

Hendaraman (2018) menyatakan bahwa kompetensi kepala sekolah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistematis, kompeten dalam mengoordinasikan semua komponen sehingga dapat membentuk sekolah sebagai organisasi belajar yang efektif, kompeten dalam mengarahkan seluruh personel sekolah sehingga mereka tulus bekerja mencapai tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesionalisme guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola pembelajaran, dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua komponen sekolah bekerja optimal.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah terdapat lima standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dengan sampel yaitu kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teori Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dengan jumlah lembaga SMP sebanyak 48 sekolah yang

tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Bungo. Jumlah SMP terdiri dari SMP Negeri sebanyak 44 sekolah dan SMP swasta 4 sekolah. Berikut ini data kepala Sekolah SMP negeri dan swasta di kabupaten Bungo menurut golongan, umur, ijazah terakhir, status sertifikasi, dan status memiliki sertifikat kepala sekolah SMP tahun 2019.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Bungo menurut Golongan, Umur, Ijazah Terakhir, Status Sertifikasi, dan Status Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah Tahun 2019

No	Nama SMP	Gol	Umur	Kualifikasi		Sertifikasi Pendidik		Sertifikat Kepala Sekolah	
				S1	S2	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	SMPN 1 Muara Bungo	✓	✓		✓	✓			✓
2	SMPN 2 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
3	SMPN 3 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓			✓
4	SMPN 4 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
5	SMPN 5 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
6	SMPN 6 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
7	SMPN 7 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
8	SMPN 8 Muara Bungo	✓	✓		✓	✓			✓
9	SMPN 9 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
10	SMPN 10 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓			✓
11	SMP S Muhamadiyah	✓	✓	✓			✓		✓
12	SMP S Xaverius	✓	✓	✓			✓		✓
13	SMP IT Al-Azhar 03	✓	✓	✓			✓		✓
14	SMPN 1 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
15	SMPN 2 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
16	SMPN 3 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
17	SMPN 4 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
18	SMPN 5 Pelepat	✓	✓	✓		✓		✓	
19	SMPN 6 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓

20	SMPN 1 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓		✓	
21	SMPN 2 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
22	SMPN 3 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓		✓	
23	SMPN 4 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
24	SMPN 5 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
25	SMP S Terpadu	✓	✓	✓			✓		✓
26	SMPN 1 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
27	SMPN 2 Tanah Sepenggal	✓	✓		✓				✓
28	SMPN 3 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
29	SMPN 4 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓			✓
30	SMPN 5 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓			✓
31	SMPN 6 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
32	SMPN 7 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
33	SMPN 8 Tanah Sepenggal	✓	✓		✓	✓			✓
34	SMPN 1 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓			✓
35	SMPN 2 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓		✓	
36	SMPN 3 Tanah Tumbuh	✓	✓		✓	✓		✓	
37	SMPN 4 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓			✓
38	SMPN 1 Jujuhan	✓	✓	✓		✓			✓
39	SMPN 2 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	
40	SMPN 3 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	
41	SMPN 4 Jujuhan	✓	✓	✓		✓			✓
42	SMPN 5 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	

43	SMPN 1 Muko Muko Bathin VII	✓	✓	✓		✓			✓
44	SMPN 2 Muko Muko Bathin VII	✓	✓		✓	✓		✓	
45	SMPN 3 Muko Muko Bathin VII	✓	✓	✓		✓		✓	
46	SMPN 1 Pelepat Ilir	✓	✓	✓		✓		✓	
47	SMPN 2 Pelepat Ilir	✓	✓	✓		✓			✓
48	SMPN 3 Pelepat Ilir	✓	✓		✓	✓			✓
Jumlah			48		7	44	4	21	27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh kepala SMP di kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus yang harus dimiliki kepala sekolah seperti sertifikat kepala SMP ada 27 orang atau sekitar 56% kepala SMP dari 48 orang kepala SMP di Kabupaten Bungo yang belum mempunyai sertifikat kepala SMP.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai implementator standar kompetensi kepala SMP ditingkat daerah bertanggung jawab untuk meneruskan informasi standar kompetensi kepala sekolah kepada kepala sekolah. Untuk melihat bagaimana implementasi standar kompetensi kepala sekolah, peneliti mengkaitkan hasil wawancara dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Georgi C Edwards dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo pada saat sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan anatar pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dan pengawas sekolah selaku penyampai informasi kepada kepala SMP. Sasaran pada sosialisasi standar kompetensi kepala SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala SMP di Kabupaten Bungo. Sosialisasi yang dilakukan dengan menyiapkan materi pada saat diklat, *workshop*, atau

pertemuan non formal kepala SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Dilapangan juga ditemukan kejelasan informasi mengenai standar kualifikasi dan kompetensi Kepala SMP, kepala SMP yang lupa dengan materi sosialisai yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Hal ini terjadi karena bahan bacaan materi sosialisai yang di sampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo jarang dibaca oleh Kepala SMP sebagai target sasaran kebijakan. Hal ini memperlihatkan masih ditemukan kepala SMPdi Kabupaten Bungo yang belum memiliki kejelasan mengenai informasi standar kompetensi.

Sertifikat kepala SMP merupakan salah satu kualifikasi khusus yang harus dimiliki seorang kepala SMP dan berdasarkan penelitian yang dilakukan masih ditemukan kepala SMP yang belum mengikuti diklat calon kepala sekolah.

Sumberdaya yang dimaksud dalam kebijakan kompetensi kepala sekolah yaitu staff, informasi, wewenang serta fasilitas. Kompetensi pelaksana kebijakan kualifikasi dan kompetensi Kepala SMP menentukan kualitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Porsonilyang cukup dan berkompeten tentu juga akan menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai pelaksanaan kebijakan standar kompetensi kepala sekolah dan juga sebagai penentu kesuksesan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan standar kompetensi kepala sekolah juga di dukung dengan menyediakan dan pemenuhan fasilitas yang diperlukan.

Disposisi, suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan apabila pelaksana tidak hanya mengetahui regulasi yang ada, tetapi juga mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada. Dua hal penting berkaitan dengan disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sudah melaksanakan disposisi khususnya pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan didalam standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMP di kabupaten Bungo yang telah

ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Struktur Birokrasi yang baik tentu akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan dapat dilihat dari keberadaan Standar Operasional Procedures (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bungo sudah melaksanakan hal struktur birokrasi khususnya melakukan pelaksanaan kebijakan standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo. Secara keseluruhan dari empat faktor implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan juga struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo tidak sepenuhnya berjalan, sedangkan faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi untuk pelaksanaan bagi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan. Dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi melalui pengawas sekolah.

Dari hasil penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dilihat dari komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, sumberdaya berkaitan dengan staff yang membantu keberhasilan implementasi standar kompetensi kepala SMP. Disposisi yang berkaitan dengan komitmen staff dalam menjalankan tugas implementasi standar kompetensi pada kepala SMP, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas pada staff yang menjalankan implementasi standar kompetensi kepala SMP.

Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah berupa sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Sosialisasi yang dilakukan berupa sisipan materi pada pelatihan-pelatihan dinilai kurang optimal.

Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang hanya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan mengakibatkan kurangnya konsistensi kepala SMP dalam memahami standar kompetensi kepala sekolah. Di lapangan masih ditemukan kepala SMP yang belum mendapatkan sertifikat kepala sekolah. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo baik dari segi staff, wewenang dan fasilitas sudah ada. Kendala yang terjadi pada penyebaran informasi yang dilakukan. Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai pengaruh penting bagi keberhasilan implementasi standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo. Sikap pelaksana kebijakan standar kompetensi kepala SMP akan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu kepala SMP yang profesional. Sikap penghambatan dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan standar kompetensi kepala sekolah bidang manajerial berupa keacuhan dan penundaan kegiatan yang diberikan atasan. Struktur Birokrasi SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kendala yang muncul berupa kurang koordinasi antar birokrasi dalam menjalankan tugas, hal ini membuat pekerjaan akan menumpuk lama untuk diselesaikan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah melalui pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan sosialisasi khusus yang membahas mengenai standar kompetensi kepala SMP agar kepala SMP dapat memahami dengan maksimal terkait standar kompetensi kepala SMP. Dengan seringnya kepala SMP menghadiri sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah pihak dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo berharap akan menciptakan kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Memotivasi kepala SMP yang belum mendapatkan sertifikat pendidik untuk mengikuti diklat agar mendapatkan sertifikat. Tidak memiliki sertifikat kepala sekolah dalam jangka waktu kepemimpinan kepala SMP tersebut dapat mempengaruhi posisi kepala sekolahnya. Kepala sekolah juga dituntut kerja secara profesional dalam menjalankan profesinya yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkelanjutan, serta proaktif dan kreatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber agar mampu membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan berkembang. Selain itu juga perlunya melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMP untuk menjalankan fungsi dari kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dan berkesinambungan terhadap semua sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional. Sumberdaya informasi yang disampaikan oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menggunakan media elektronik yaitu menggunakan email dan whatapps jadi seharusnya bisa lebih cepat didapatkan oleh kepala SMP tetapi hal yang terjadi sebaliknya. Hal ini terjadi karena kasalahan teknis. Untuk mengatasi kendala ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya berupa menegur staff yang lalai dalam hal ini dan melakukan pengawasan agar semua dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo berkaitan dengan masalah disposisi yaitu dengan memberikan insentif yang lancar di keluarkan setiap bulanya. Diharapkan dengan lancarnya insentif brokrasi yang bekerja dapat bekerja dengan baik dan tidak menghambat implementasi standar kompetensi kepala SMP. Sementara itu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo yaitu memangkas koordinasi yang panjang, agar pekerjaan bisa cepat selesai. Membuat SOP yang jelas tentu juga akan membantu implementasi dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi pengawas sekolah dalam melakukan monitoring dan pengawasan kepada kepala SMP yaitu dengan melakukan komunikasi yang lancar dan melakukan koordinasi yang baik dengan kepala sekolah. Pembinaan kepala pengawas sekolah dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bungo.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus yang harus dimiliki kepala sekolah seperti sertifikat kepala SMP ada 27

orang atau sekitar 56% kepala SMP dari 48 orang Kepala SMP di Kabupaten Bungo yang belum mempunyai sertifikat sebagai kepala SMP, dan untuk melihat keberhasilannya dapat dilihat melalui empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo faktor yang berpengaruh cukup besar yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi kepala SMP di kabupaten Bungo tidak sepenuhnya berjalan. Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dengan kepala SMP terjadi ketika sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah yang di sampaikan melalui pengawas SMP, sedangkan faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi untuk pelaksanaan bagi kepala SMP di kabupaten Bungo sudah dilaksanakan. Selain melakukan komunikasi dalam sosialisasi, pengawas sekolah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. Hambatan-hambatan dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP yaitu kurangnya sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, lambatnya informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo kepada kepala SMP, minimnya dedikasi dan tingkah oknum yang menghambat jalannya implementasi, dan kurangnya koordinasi antar birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi Kepala SMP yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah, menegur dan melakukan pembinaan kepada staff agar tepat waktu dalam menyampaikan informasi, memeberikan insentif yang lancar kepada birokrasi, dan birokrasi dituntut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo agar bekerja dengan SOP yang telah ada pada pekerjaan itu.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dan kepala SMP yaitu agar meningkatkan kinerjanya dalam memberikan motivasi dan pembinaan kepada staff dan birokrasi yang terlibat didalam

implementasi satandar kompetensi kepala sekolah. Untuk mengimplementasikan standar kompetensi kepala SMP dengan baik, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo harus terus berupaya melakukan pembinaan terhadap kepala SMP dan harus melakukan koordinasi serta evaluasi agar kegiatan yang dilakukan terarah dan tersusun sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan, karena ditemukan masih ada kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T & Didin, H. 2013. **Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim**. Reka Cipta: Jakarta.
- Hendaraman, R. 2018. **Kepala Sekolah sebagai Manajer Teori dan Praktik**. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Leo, A. 2012. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Alfabeta: Bandung.
- Hasibuan, M.S.P. 2016. **Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tabrani, R. 2013. **Profesionalisme Kepala Sekolah**. Darma Kreatif Mandiri: Jakarta.